



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002532.AH.01.07.TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BRANTAS NARKOTIKA DAN MAKSIAAT**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAHRUL ROZI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 137 Tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh FAHRUL ROZI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BRANTAS NARKOTIKA DAN MAKSIAAT disingkat BNM tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018022718101235 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BRANTAS NARKOTIKA DAN MAKSIAAT disingkat BNM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN BRANTAS NARKOTIKA DAN MAKSIAAT disingkat BNM
Berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG, sesuai salinan Akta Nomor 137 Tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh FAHRUL ROZI, SH, yang berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2018

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOTARIS KOTA BANDAR LAMPUNG





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002532.AH.01.07.TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BRANTAS NARKOTIKA DAN MAKSIAT**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
FAUZI MALANDA	1871051407600002	PENGURUS	KETUA UMUM
DOKTER ADI NAPANGGALA	1871132204920005	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
GRACE YULIANDRI KURNIAWAN	1871053107730001	PENGURUS PENGAWAS	BENDAHARA UMUM

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2018

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOTARIS NOTABANDAR LAMPUNG

